

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

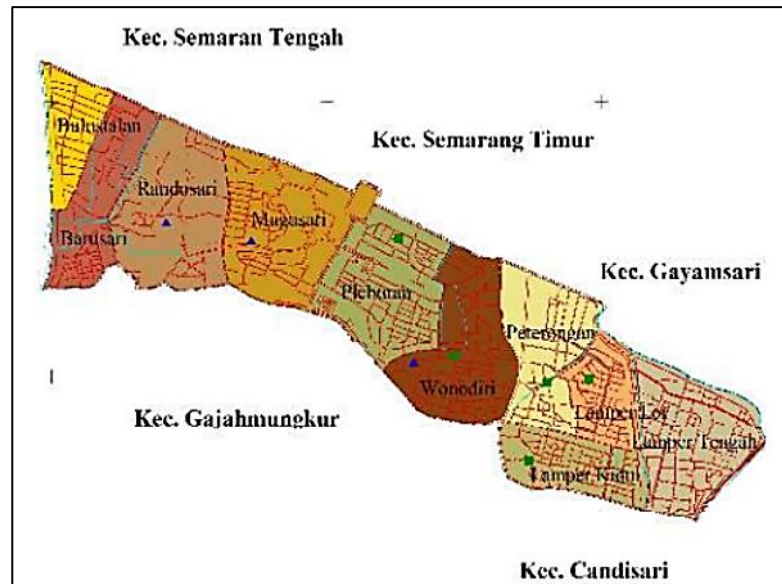
4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Semarang Selatan merupakan salah satu kecamatan dari 16 Kecamatan di Kota Semarang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang. Kecamatan Semarang Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Kecamatan Semarang Selatan menjadi lokasi perdagangan, perumahan, dan pendidikan dengan luas wilayah sebesar 556,01 Ha. Terdapat 10 kelurahan yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Semarang Selatan, yaitu Kelurahan Bulustalan, Kelurahan Randusari, Kelurahan Barusari, Kelurahan Mugassari, Kelurahan Pleburan, Kelurahan Wonodri, Kelurahan Peterongan, Kelurahan Lamper Lor, Kelurahan Lamper Kidul, dan Kelurahan Lamper Tengah. Tiap kelurahan memiliki persamaan dan perbedaan karakteristik, baik terkait permasalahan maupun potensi wilayah.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kecamatan Semarang Selatan



Sumber Data: Kecamatan Semarang Selatan, 2025

Kecamatan Semarang Selatan meliputi 71 Rukun Warga (RW) dan 498 Rukun Tetangga (RT) serta total penduduk 66.309 jiwa per 31 Desember 2024, dengan rincian 34.476 laki-laki serta 33.833 perempuan terdata pada 24.207 Kepala Keluarga (KK). Rata-rata penduduk bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, dan pegawai swasta, selain itu juga terdapat cukup banyak penduduk yang sudah pensiun dan mengurus rumah tangga. Berikut pembagian kelompok usia masyarakat di Kecamatan Semarang Selatan.

- Kelompok usia 0-14 tahun : 12.263 jiwa
- Kelompok usia 15-29 tahun : 15.134 jiwa
- Kelompok usia 30-44 tahun : 13.812 jiwa
- Kelompok usia 45-59 tahun : 14.849 jiwa
- Kelompok usia 60 tahun ke atas: 10.251 jiwa

4.1.2 Karakteristik Responden

Wajib PBB di Kecamatan Semarang Selatan ditentukan sebagai partisipan pada studi. Penelitian ini dilaksanakan pada 27 Januari - 16 Februari 2025 melalui penyebaran kuesioner yang ditujukan untuk 100 partisipan dan menggunakan metode *simple random sampling*. Berikut deskripsi responden berdasar jenis kelamin, usia, pendidikan tertinggi, profesi, domisili, dan waktu tinggal.

4.1.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-Laki	31	31%
Perempuan	69	69%
Jumlah	100	100%

Sumber Data: Diolah Penulis, 2025

Tabel 4.1 menggambarkan dari 100 partisipan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, terdapat perbedaan signifikan antara jumlah partisipan laki-laki serta perempuan. Responden perempuan mendominasi dengan total 69 partisipan atau mewakili sebanyak 69% dari total sampel. Dominasi responden perempuan ini dikarenakan banyaknya ibu rumah tangga yang mengetahui dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

4.1.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2
Data Responden Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	Jumlah Responden	Persentase
15-29	13	13%
30-44	20	20%
45-59	40	40%
60 tahun ke atas	27	27%
Jumlah	100	100%

Sumber Data: Diolah Penulis, 2025

Tabel 4.3 menyatakan partisipan yang terlibat pada studi ini sebagian besar diduduki oleh responden yang berumur 45-59 tahun sejumlah 40 orang, lalu diikuti responden berumur di atas 60 tahun sejumlah 27 orang, responden usia 30-44 sebanyak 20 orang, serta responden yang berusia 15-29 tahun sebanyak 13 orang. Salah satu bagian unik dari studi yang dilakukan yaitu responden yang berumur lebih dari 60 tahun masih aktif dan tertib dalam melakukan kewajiban PBB meskipun tidak mendominasi partisipan pada studi ini.

4.1.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3
Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SD	8	8%
SMP	9	9%
SMA	51	51%
D1/D2/D3	10	10%
S1/D4	21	21%
S2	1	1%
Jumlah	100	100%

Sumber Data: Diolah Penulis, 2025

Tabel 4.3 menunjukkan tingkat pendidikan terakhir responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini bervariasi yakni tingkat Sekolah Dasar sampai Strata-2. Pada penelitian yang telah dilakukan sebagian besar partisipan mempunyai pendidikan terbaru pada jenjang SMA, yakni 51% dari total seluruh responden. Kemudian diikuti oleh lulusan S1/D4 sebanyak 21%, lulusan D1/D/D3 sebanyak 10%, lulusan SMP sebanyak 9%, lulusan SD sebanyak 8%, serta lulusan S2 sebanyak 1%. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa dengan latar belakang pendidikan apa pun tidak menghalangi seseorang untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

4.1.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4
Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
PNS	2	2%
Wiraswasta	32	32%
Pegawai Swasta	34	34%
Lainnya	32	32%
Jumlah	100	100%

Sumber Data: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan informasi pada tabel 4.4, dapat diketahui bahwa responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner pada penelitian ini kebanyakan adalah karyawan swasta sejumlah 34% dari total keseluruhan responden, kemudian diikuti oleh responden dengan pekerjaan wiraswasta serta jenis pekerjaan lainnya yang masing-masing mewakili 32%, sisanya sebanyak

2% bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Responden yang termasuk dalam jenis pekerjaan lainnya, antara lain bekerja sebagai buruh, pensiunan, dan ibu rumah tangga.

4.1.2.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal

Tabel 4.5
Data Responden Berdasarkan Tempat Tinggal

Kelurahan	Jumlah Responden	Persentase
Bulustalan	10	10%
Barusari	10	10%
Randusari	10	10%
Mugassari	10	10%
Pleburan	10	10%
Wonodri	10	10%
Peterongan	10	10%
Lamper Lor	10	10%
Lamper Kidul	10	10%
Lamper Tengah	10	10%
Jumlah	100	100%

Sumber Data: Diolah Penulis, 2025

Penelitian ini dilakukan dengan menyasar pada 10 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Selatan. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tiap kelurahan diwakili oleh 10 partisipan yang menjawab angket. Responden yang ditentukan tanpa aturan tertentu dengan metode *simple random sampling*.

4.1.2.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Tinggal

Tabel 4.6
Data Responden Berdasarkan Lama Tinggal

Lama Tinggal	Jumlah Responden	Persentase
< 2 tahun	1	1%
2 – 4 tahun	3	3%
5 – 7 tahun	2	2%
> 7 tahun	44	44%
Jumlah	100	100%

Sumber Data: Diolah Penulis, 2025

Data pada tabel 4.6 menyimpulkan bahwa responden yang ikut berpartisipasi pada studi ini ialah Wajib Pajak dengan lama tinggal di Kecamatan Semarang Selatan yang bervariasi. Hasil penelitian ini didominasi oleh responden yang sudah tinggal dan memiliki kewajiban PBB di wilayah Kecamatan Semarang Selatan selama 7 tahun lebih. Hasil tersebut menggambarkan bahwa partisipan pada kuesioner studi ini sudah banyak mempunyai pengalaman terkait membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Semarang Selatan.

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian menjabarkan rincian jawaban yang partisipan beri terhadap setiap pertanyaan terkait dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, Insentif Pajak, Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT, serta Informasi Pajak di Media Sosial. Responden akan memberikan jawaban atas tiap indikator suatu variabel dengan memilih angka dari 1 sampai 5 yang mana angka 1 menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju dengan pernyataan indikator, sementara angka 5 menggambarkan partisipan yang sangat setuju pada pertanyaan. Kecenderungan jawaban tiap variabel dapat diukur dengan mengategorikan jawaban responden dalam lima kelompok rentang skala (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi) sebagai berikut.

$$\text{Rentang Skala} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{5}$$

$$\text{Rentang Skala} = \frac{5-1}{5}$$

$$\text{Rentang Skala} = 0,8$$

Keterangan rentang skala:

- a) Angka 1,00 – 1,80 = Sangat Rendah
- b) Angka 1,81 – 2,60 = Rendah
- c) Angka 2,61 – 3,40 = Sedang
- d) Angka 3,41 – 4,20 = Tinggi
- e) Angka 4,21 – 5,00 = Sangat Tinggi

4.1.3.1 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam penelitian ini diukur menggunakan tujuh indikator dengan frekuensi jawaban responden diuraikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

No	Indikator	Frekuensi Jawaban					Rata-rata jawaban
		STS	TS	N	S	SS	
1	Saya memenuhi kewajiban perpajakan Bumi dan Bangunan sesuai peraturan yang berlaku	0 (0%)	1 (1%)	10 (10%)	44 (44%)	45 (45%)	4,33
2	Saya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu sebelum jatuh tempo	0 (0%)	16 (16%)	5 (5%)	35 (35%)	44 (44%)	4,07

3	Saya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB	0 (0%)	1 (1%)	3 (3%)	49 (49%)	47 (47%)	4,42
4	Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan	0 (0%)	13 (13%)	7 (7%)	38 (38%)	42 (42%)	4,09
5	Saya melunasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan apabila saya terlambat membayar pajak tepat waktu	2 (2%)	7 (7%)	8 (8%)	44 (44%)	39 (39%)	4,11
6	Saya tidak pernah dijatuhi sanksi pajak apapun (denda/bunga/kenaikan/pidana)	0 (0%)	12 (12%)	8 (8%)	35 (35%)	45 (45%)	4,13
7	Saya kooperatif dan patuh dengan petugas selama proses pelaksanaan perpajakan	0 (0%)	1 (1%)	5 (5%)	49 (49%)	45 (45%)	4,38
Rata-rata							4,22

Sumber Data: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan hasil statistik deskriptif seperti tabel 4.7, ditemukan penilaian partisipan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan rata-rata adalah 4,22 yang tergolong dalam rentang skala sangat tinggi karena berada dalam interval angka 4,21 – 5,00. Hal ini berarti secara keseluruhan responden memiliki ketaatan yang tinggi sebagai Wajib Pajak. Indikator dengan penilaian responden yang paling tinggi pada variabel ini terdapat pada indikator tiga yakni terkait membayar PBB sesuai nominal pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dengan rata-rata jawaban sebesar

4,42. Sebaliknya, indikator dengan penilaian responden yang paling rendah pada variabel ini terdapat pada indikator dua yakni terkait melakukan pembayaran PBB tidak melewati tenggat waktu dengan rata-rata jawaban sebesar 4,07.

4.1.3.2 Deskripsi Variabel Insentif Pajak

Variabel Insentif Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan tujuh indikator dengan frekuensi jawaban responden diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Statistik Deskriptif Variabel Insentif Pajak

No	Indikator	Frekuensi Jawaban					Rata-rata jawaban
		STS	TS	N	S	SS	
1	Saya mengetahui dan memahami kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan (diskon/pengurangan pajak, penghapusan denda, dll) yang diberikan pemerintah	0 (0%)	0 (0%)	26 (26%)	48 (48%)	26 (26%)	4,00
2	Insentif pajak memotivasi saya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan	0 (0%)	0 (0%)	19 (19%)	56 (56%)	25 (25%)	4,06
3	Insentif pajak membantu dan meringankan saya dalam membayar pajak karena beban pajak menjadi berkurang	0 (0%)	2 (2%)	17 (17%)	52 (52%)	29 (29%)	4,08
4	Saya merasa diuntungkan dengan adanya insentif Pajak Bumi dan Bangunan	0 (0%)	4 (4%)	25 (25%)	46 (46%)	25 (25%)	3,92
5	Saya merasa insentif Pajak Bumi dan Bangunan sudah diberikan secara adil oleh pemerintah	0 (0%)	5 (5%)	30 (30%)	44 (44%)	21 (21%)	3,81

6	Pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	0 (0%)	3 (3%)	22 (22%)	53 (53%)	22 (22%)	3,94
7	Pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan sebagai bentuk edukasi pemerintah tentang pentingnya pajak	0 (0%)	3 (3%)	22 (22%)	50 (50%)	25 (25%)	3,97
Rata-rata							3,97

Sumber Data: Diolah Penulis, 2025

Tabel 4.8 statistik deskriptif di atas menunjukkan frekuensi penilaian responden terhadap variabel insentif pajak yang rata-rata jawabannya berada pada angka 3,97 dan dapat dikategorikan pada skala tinggi karena termasuk dalam rentang angka 3,41 sampai 4,20. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan jika adanya insentif pajak menarik minat yang sangat tinggi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PBB oleh Wajib Pajak. Indikator pada variabel ini yang memiliki penilaian tertinggi dari para responden yaitu terdapat pada indikator ketiga yang menyatakan bahwa insentif pajak membantu dan meringankan banyaknya tagihan dalam pelunasan PBB karena beban pajak menjadi berkurang dengan rata-rata jawaban sebesar 4,08. Indikator pada variabel ini yang memiliki penilaian terendah dari para Wajib Pajak terdapat pada indikator kelima yakni terkait keadilan pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah dengan rata-rata jawaban sebesar 3,81.

4.1.3.3 Deskripsi Variabel Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT

Variabel Aplikasi Pakde Semar Hebat dalam penelitian ini diukur menggunakan tujuh indikator dengan frekuensi jawaban responden yang diuraikan pada tabel.

Tabel 4.9
Statistik Deskriptif Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT

No	Indikator	Frekuensi Jawaban					Rata-rata jawaban
		STS	TS	N	S	SS	
1	Saya mengetahui dan menggunakan Aplikasi Pajak Daerah Kota Semarang untuk melakukan perpajakan secara <i>online</i>	0 (0%)	38 (38%)	34 (34%)	22 (22%)	6 (6%)	2,96
2	Aplikasi pembayaran pajak secara <i>online</i> dapat membuat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lebih efektif dalam waktu dan biaya	1 (1%)	22 (22%)	34 (34%)	33 (33%)	10 (10%)	3,29
3	Aplikasi Pajak Daerah Kota Semarang memiliki fitur yang memudahkan saya dalam melakukan perpajakan	0 (0%)	41 (41%)	28 (28%)	22 (22%)	9 (9%)	2,99
4	Aplikasi Pajak Daerah Kota Semarang membantu saya dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	1 (1%)	44 (44%)	22 (22%)	23 (23%)	10 (10%)	2,97
5	Pembayaran PBB secara <i>online</i> dapat menciptakan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pembayaran pajak	1 (1%)	25 (25%)	33 (33%)	28 (28%)	13 (13%)	3,27
6	Aplikasi Pajak Daerah Kota Semarang meningkatkan minat saya	2 (2%)	35 (35%)	29 (29%)	24 (24%)	10 (10%)	3,05

	untuk membayar pajak secara <i>online</i>						
7	Saya merasa sistem pembayaran PBB secara <i>online</i> fleksibel dengan aktivitas saya karena dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun	2 (2%)	23 (23%)	31 (31%)	32 (32%)	12 (12%)	3,29
Rata-rata							3,12

Sumber Data: Diolah Penulis, 2025

Penilaian responden terhadap variabel Aplikasi Pakde Semar Hebat dalam penelitian ini menghasilkan rata-rata jawaban pada angka 3,12 yang termasuk pada rentang angka 2,61 hingga 3,40 yaitu pada skala sedang. Sesuai kondisi itu, simpulan yang bisa diambil yakni beberapa Wajib Pajak dimudahkan melalui pembayaran PBB secara *online*, namun masih banyak yang belum mengetahui dan menggunakan Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT sebagai aplikasi pembayaran pajak secara *online* yang dihadirkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Indikator kedua dan ketujuh pada variabel penelitian ini menempati rata-rata jawaban tertinggi yaitu pada angka 3,29 yang berarti responden sepakat jika pelunasan PBB secara *online* bisa meningkatkan efisiensi dalam waktu dan biaya serta lebih fleksibel. Akan tetapi, indikator pertama terkait dengan pengetahuan dan penggunaan Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT menduduki posisi rata-rata jawaban terendah pada variabel ini yakni sebesar 2,96.

4.1.3.4 Deskripsi Variabel Informasi Pajak di Media Sosial

Variabel Informasi Pajak di Media Sosial dalam penelitian ini diukur menggunakan tujuh indikator dengan frekuensi jawaban responden yang diuraikan pada tabel.

Tabel 4.10
Statistik Deskriptif Informasi Pajak di Media Sosial

No	Indikator	Frekuensi Jawaban					Rata-rata jawaban
		STS	TS	N	S	SS	
1	Saya pernah membaca dan mengetahui informasi pajak (foto maupun video) yang dibagikan oleh pemerintah di media sosial (Instagram, WhatsApp, YouTube, dll)	0 (0%)	18 (18%)	23 (23%)	39 (39%)	20 (20%)	3,61
2	Saya merasa informasi pajak yang dibagikan di media sosial jelas dan mudah dipahami	1 (1%)	16 (16%)	31 (31%)	31 (31%)	21 (21%)	3,55
3	Saya merasa informasi pajak yang dibagikan sesuai dengan fakta dan tidak menipu	0 (0%)	19 (19%)	21 (21%)	37 (37%)	23 (23%)	3,64
4	Informasi pajak di media sosial menyediakan informasi yang saya butuhkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan	0 (0%)	20 (20%)	19 (19%)	44 (44%)	17 (17%)	3,58
5	Saya merasakan manfaat dari informasi pajak yang dibagikan di media sosial	2 (2%)	18 (18%)	16 (16%)	44 (44%)	20 (20%)	3,62
6	Informasi pajak di media sosial membantu saya untuk memahami peraturan perpajakan terbaru	2 (2%)	17 (17%)	17 (17%)	44 (44%)	20 (20%)	3,63
7	Informasi pajak di media sosial mendorong saya untuk melakukan kewajiban perpajakan	2 (2%)	17 (17%)	18 (18%)	46 (46%)	17 (17%)	3,59

	sesuai informasi yang diberikan						
Rata-rata							3,60

Sumber Data: Diolah Penulis, 2025

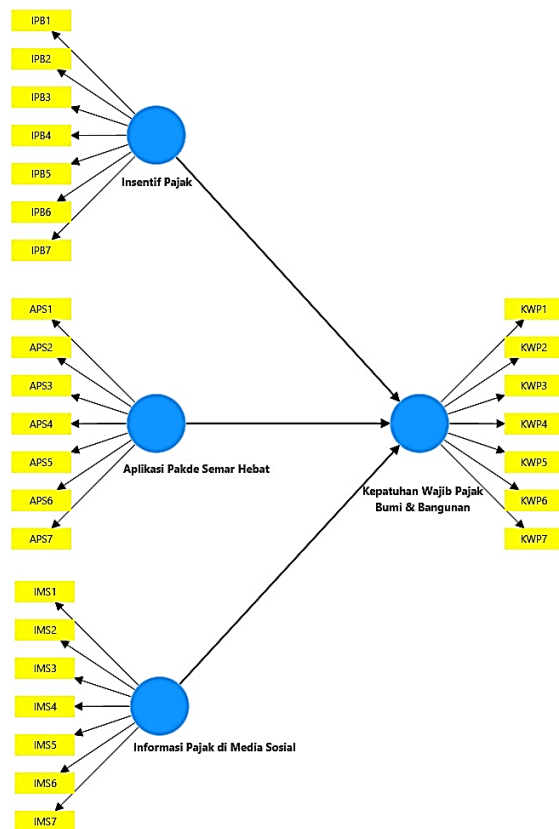
Tabel 4.10 menyatakan penilaian responden terhadap variabel Informasi Pajak di Media Sosial yang mana rata-rata jawaban responden pada variabel ini menunjukkan angka 3,60 dan dapat dikategorikan pada skala tinggi karena terletak di interval 3,41 – 4,20. Rata-rata jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah membaca informasi pajak yang dibagikan oleh pemerintah melalui media sosial dan informasi pajak tersebut jelas serta sesuai dengan kenyataan. Pada variabel ini, indikator yang memperoleh rata-rata jawaban paling tinggi adalah indikator ketiga bahwa informasi pajak yang dibagikan sesuai dengan fakta dan tidak menipu dengan rata-rata jawaban sebesar 3,64, sementara itu indikator yang memperoleh rata-rata jawaban paling rendah adalah indikator kedua bahwa informasi pajak yang dibagikan di media sosial jelas dan mudah dipahami dengan rata-rata jawaban sebesar 3,55.

4.2 Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis dengan metode *Structural Equation Modeling- Partial Least Square (PLS)* dan bantuan *software SmartPLS* versi 4.0. Metode tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu model pengukuran atau *outer model* dan model struktural atau *inner model*.

Menurut Sihombing et al. (2024), model pengukuran (*outer model*) ialah model penelitian yang menjelaskan hubungan antara indikator dan variabel latennya. Model struktural (*inner model*) ialah model penelitian yang menggambarkan kaitan variabel satu dengan lainnya. Studi ini melibatkan 4 variabel laten yang diukur dengan total 28 indikator.

Gambar 4.2
Model Diagram Jalur



Sumber Data: Diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

IPB : Insentif Pajak Bumi dan Bangunan

APS : Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT!

IMS : Informasi Pajak di Media Sosial

4.2.1 Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model digunakan untuk mengevaluasi kaitan yang terjadi antara variabel laten dengan indikator-indikatornya dengan pengujian validitas serta reliabilitas. Pengujian tersebut bertujuan untuk memahami seberapa baik indikator-indikator tersebut mewakili variabel laten.

4.2.1.1 Validitas Konvergen (*Covergent Validity*)

Pengujian yang berdasar pada *loading* faktor variabel laten terhadap indikatornya disebut validitas konvergen. Apabila nilai *outer loading* faktor suatu indikator di atas angka 0,70 sehingga bisa diketahui kevalidan dari indikator itu dan adanya korelasi yang kuat antara indikator terhadap variabel pengukuran. Akan tetapi, apabila *outer loading* faktor suatu indikator di bawah angka 0,70 maka indikator tersebut dinyatakan tidak valid dan memiliki korelasi yang lemah dengan konstruksya serta perlu dipertimbangkan untuk dihapus.

Tabel 4.11
Nilai *Outer Loading* Tiap Indikator

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	KWP1	0,911	Valid
	KWP2	0,892	Valid
	KWP3	0,828	Valid
	KWP4	0,902	Valid
	KWP5	0,860	Valid
	KWP6	0,892	Valid
	KWP7	0,867	Valid
Insentif Pajak (X1)	IPB1	0,803	Valid
	IPB2	0,897	Valid
	IPB3	0,859	Valid

	IPB4	0,901	Valid
	IPB5	0,884	Valid
	IPB6	0,924	Valid
	IPB7	0,884	Valid
Aplikasi Pakde Semar Hebat (X2)	APS1	0,823	Valid
	APS2	0,903	Valid
	APS3	0,950	Valid
	APS4	0,954	Valid
	APS5	0,905	Valid
	APS6	0,896	Valid
	APS7	0,892	Valid
Informasi Pajak di Media Sosial (X3)	IMS1	0,926	Valid
	IMS2	0,950	Valid
	IMS3	0,944	Valid
	IMS4	0,917	Valid
	IMS5	0,923	Valid
	IMS6	0,911	Valid
	IMS7	0,888	Valid

Sumber Data: Diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Hasil analisis pada tabel 4.11 menunjukkan *outer loading* dari indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini bernilai antara 0,828 – 0,911. *Outer loading* dari indikator pada ketiga variabel independen, yakni Insentif Pajak bernilai antara 0,803 – 0,924, Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT bernilai antara 0,823 – 0,954, serta Informasi Pajak di Media Sosial bernilai antara 0,888 – 0,950. Semua indikator variabel dependen maupun independen memiliki angka *outer loading* lebih tinggi dari 0,70 jadi bisa dikatakan keseluruhan indikator variabel dependen dan variabel independen sangat valid memenuhi validitas konvergen serta valid dalam mengukur

variabel laten dan tidak perlu mengeliminasi indikator atau dihapus dari model.

Tabel 4.12
Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0,773
Insentif Pajak	0,774
Aplikasi Pakde Semar Hebat	0,818
Informasi Pajak di Media Sosial	0,852

Sumber Data: Diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Pengukuran validitas konvergen juga bisa dilakukan dengan menentukan *Average Variance Extracted* (AVE) dari tiap variabel penelitian. Tabel 4.12 memberikan data bahwa AVE dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Bangunan bernilai 0,773, AVE dari variabel Insentif Pajak bernilai 0,774, AVE dari variabel Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT bernilai 0,818, serta AVE dari variabel Informasi Pajak di Media Sosial bernilai 0,852, keempat variabel laten tersebut mempunyai AVE di atas 0,50. Sesuai nilai AVE tersebut, dapat disimpulkan jika indikator-indikator dari semua variabel pada studi mempunyai tingkat validitas konvergen tinggi, yang berarti bisa dilanjutkan dengan pengujian lainnya.

4.2.1.2 Validitas Diskriminan *Discriminant Validity*

Validitas Diskriminan diuji untuk menentukan sesuai atau tidaknya diskriminan yang dipunyai oleh suatu konstruk, yakni

dengan melakukan perbandingan antara *loading* faktor variabel yang dimaksud dengan nilai *loading* faktor konstruk lainnya. Konstruk dikatakan memiliki diskriminan yang sesuai apabila *loading* faktor konstruk yang dimaksud di atas *loading* faktor konstruk yang lain. Validitas diskriminan diuji melalui perbandingan *cross loading* faktor serta perbandingan nilai *square root of Average Variance Extracted* (AVE).

Tabel 4.13
Nilai Cross Loading Indikator

Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Insentif Pajak (X1)	Aplikasi Pakde Semar Hebat (X2)	Informasi Pajak di Media Sosial (X3)
KWP1	0,911	0,179	0,145	0,040
KWP2	0,892	0,190	0,102	0,022
KWP3	0,828	0,190	0,135	0,149
KWP4	0,902	0,190	0,093	0,027
KWP5	0,860	0,204	0,143	0,056
KWP6	0,892	0,168	0,163	0,079
KWP7	0,867	0,264	0,124	0,133
IPB1	0,143	0,803	0,155	0,352
IPB2	0,193	0,897	0,261	0,356
IPB3	0,128	0,859	0,202	0,363
IPB4	0,153	0,901	0,219	0,420
IPB5	0,191	0,884	0,182	0,391
IPB6	0,260	0,924	0,245	0,328
IPB7	0,257	0,884	0,215	0,294
APS1	0,147	0,310	0,823	0,361
APS2	0,129	0,127	0,903	0,289
APS3	0,088	0,224	0,950	0,418
APS4	0,179	0,244	0,954	0,402
APS5	0,130	0,157	0,905	0,309
APS6	0,075	0,306	0,896	0,338
APS7	0,127	0,187	0,892	0,241
IMS1	0,064	0,344	0,278	0,926
IMS2	0,134	0,394	0,359	0,950
IMS3	0,052	0,409	0,338	0,944
IMS4	0,034	0,340	0,377	0,917

IMS5	0,010	0,334	0,385	0,923
IMS6	0,042	0,336	0,391	0,911
IMS7	0,039	0,343	0,355	0,888

Sumber Data: Diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Nilai *cross loading* pada tabel memberikan informasi bahwa nilai *cross loading* faktor terbesar dari masing-masing indikator sesuai dengan variabel latennya. Nilai loading antara tiap variabel indikator pada variabel latennya, lebih tinggi daripada dengan variabel laten lainnya, sebagai contoh nilai loading antara KWP1 dengan Kepatuhan Wajib PBB (variabel latennya) sebesar 0,911 berada di atas nilai loading antara KWP1 terhadap variabel lainnya, secara rinci nilai loading antara KWP1 dengan Insentif Pajak sebesar 0,179, nilai loading antara KWP1 dengan Aplikasi Pakde SEMAR HEBAT sebesar 0,145, dan nilai loading antara KWP1 dengan Informasi Pajak di Media Sosial sebesar 0,040, hal ini juga terjadi terhadap indikator-indikator lainnya. Berdasarkan keluaran itu, didapatkan kevalidan indikator-indikator pada studi ini dan memenuhi uji validitas diskriminan. Cara lain untuk menguji validitas diskriminan yakni dengan melakukan perbandingan *square root of AVE*.

Tabel 4.14
Nilai *Fornell-Larcker Criterion*

Variabel	Aplikasi Pakde Semar Hebat	Informasi Pajak di Media Sosial	Insentif Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi & Bangunan Bumi dan Bangunan
Aplikasi Pakde Semar Hebat	0,904			
Informasi Pajak di Media Sosial	0,374	0,923		
Insentif Pajak	0,244	0,397	0,880	
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0,147	0,084	0,228	0,879

Sumber Data: Diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Hasil *Fornell-Larcker Criterion* di atas menunjukkan korelasi indikator pada konstruknya lebih besar dibanding kolerasi indikator dengan konstruk lainnya sehingga dikatakan terdapat *discriminant validity* yang baik, sebagai contoh nilai akar AVE (*square root of AVE*) variabel Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT dengan sesama variabel latennya yakni variabel Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT menunjukkan sebesar 0,904 yang berarti nilainya lebih besar dibanding dengan nilai akar AVE Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT terhadap variabel Informasi Pajak di Media Sosial sebesar 0,374, terhadap variabel Insentif Pajak 0,244, serta terhadap variabel Kepatuhan Wajib PBB pada angka 0,147. Hal ini

sejalan dengan hasil perbandingan *cross loading* yang juga menjelaskan validitas tinggi pada model, dengan demikian uji validitas diskriminan pada penelitian ini terpenuhi.

4.2.1.3 Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini, pengujian yang dipakai untuk pengukuran mengenai apakah instrumen akan tetap konsisten jika dilakukan secara berulang-ulang menggunakan alat pengukuran yang konsisten disebut uji reliabilitas. Pengukuran tersebut dilaksanakan dengan melihat *cronbach's alpha* dan *composite reliability* dari indikator pengukur variabel. Nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* di atas 0,70 menjelaskan konstruk mempunyai reliabilitas yang baik.

Tabel 4.14
Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0,951	0,955	0,960	0,773
Insentif Pajak	0,952	0,982	0,960	0,774
Aplikasi Pakde Semar Hebat	0,963	0,988	0,969	0,818
Informasi Pajak di Media Sosial	0,975	1,288	0,976	0,852

Sumber Data: Diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan pengolahan data sesuai tabel, terlihat *cronbach's alpha* variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan

Bangunan berada pada angka 0,951, Insentif Pajak dengan *cronbach's alpha* 0,952, Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT dengan *cronbach's alpha* pada angka 0,963, serta nilai *cronbach's alpha* Informasi Pajak di Media Sosial pada angka 0,975 sehingga *cronbach's alpha* seluruh konstruk melebihi 0,70.

Composite reliability (ρ_a) dan (ρ_b) seluruh konstruk juga memiliki nilai lebih tinggi dari 0,70, dengan rincian variabel Kepatuhan Wajib PBB pada angka 0,955 dan 0,960, *composite reliability* variabel Insentif Pajak pada angka 0,982 dan 0,960, nilai *composite reliability* variabel Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT sebesar 0,988 dan 0,969, serta nilai *composite reliability* variabel Informasi Pajak di Media Sosial sebesar 1,288 dan 0,976. Berdasarkan hasil *cronbach's alpha* dan *composite reliability*, disimpulkan seluruh konstruk reliabel dan pengukuran data dilakukan secara konsisten (reliabilitas).

4.2.2 Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara konstruk dan nilai signifikansinya. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel dependen dan nilai koefisien path untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai *t-statistic* setiap *path*.

4.2.2.1 Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Pengaruh yang penting antara variabel independen dengan variabel dependen diukur melalui *R-Square* yang juga menggambarkan ketepatan variabel bebas dalam menggambarkan variabel terikat. Apabila *R-square* $\geq 0,67$ menggambarkan pengaruh yang kuat, *R-square* antara 0,33 – 0,66 menggambarkan pengaruh moderat, serta *R-square* antara 0,19 – 0,32 menggambarkan pengaruh lemah.

Tabel 4.15
Nilai *R-Square* dan *R-Square Adjusted*

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0,633	0,333

Sumber Data: Diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Keluaran pengujian sesuai tabel 4.15 menunjukkan nilai *R-square Adjusted* sebesar 0,333 artinya Insentif Pajak, Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT, dan Informasi Pajak di Media Sosial sebagai variabel independen dapat menggambarkan variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 33,3%. Menurut hal tersebut, didapatkan jika variabel independen berdampak moderat kepada variabel dependen karena nilai *R-square Adjusted* berada pada rentang 0,33 – 0,66.

4.2.2.2 Uji *F-Square*

Pengujian yang dipakai menilai dampak variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen disebut Uji *F-Square*.

Jika nilai *F-Square* sebesar 0,02 artinya berpengaruh lemah, 0,15 artinya berpengaruh moderat, kemudian 0,35 artinya berpengaruh kuat.

Tabel 4.16
Nilai *F-Square*

	<i>F-Square</i>
Insentif Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak Bumi & Bangunan	0,042
Aplikasi Pakde Semar Hebat → Kepatuhan Wajib Pajak Bumi & Bangunan	0,011
Informasi Pajak di Media Sosial → Kepatuhan Wajib Pajak Bumi & Bangunan	0,002

Sumber Data: Diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan Tabel 4.16, tingkat dampak Insentif Pajak pada Kepatuhan Wajib PBB ialah 0,042 yang berarti mempunyai pengaruh dengan tingkat pengaruh yang lemah karena nilai $0,02 < F\text{-Square} < 0,15$ atau *F-Square* bernilai 0,042 lebih dari 0,02 namun kurang dari 0,15 maka digolongkan dalam kategori berpengaruh lemah. Akan tetapi, Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT dan Informasi Pajak di Media Sosial tidak berpengaruh karena nilai *F-Square* $< 0,02$ dengan nilai Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT pada 0,011 serta Informasi Pajak di Media Sosial bernilai 0,002.

4.2.2.3 Uji *Predictive Relevance* (Q^2)

Q-square berfungsi untuk menghitung tingkat kesanggupan model dalam memprediksi. Angka *Q-square* di atas 0 (nol) menggambarkan model memiliki relevansi prediksi yang bagus, sementara angka *Q-square* dibawah atau sama dengan 0 (nol)

menggambarkan kurangnya relevansi prediksi yang dipunyai oleh model. Berikut perhitungan untuk melakukan uji *predictive relevance*.

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,633)$$

$$Q^2 = 1 - 0,367$$

$$Q^2 = 0,633$$

Menurut perhitungan, nilai *Q-Square* yang didapat sejumlah 0,633. Maka dari itu, menyatakan adanya *predictive relevance* yang bagus di model penelitian ini.

4.2.3 Uji Hipotesis

Penilaian hipotesis pada studi dilaksanakan melalui pengecekan *T statistics* serta *P Values* serta didukung dengan penggunaan teknik analisis *bootstrapping*. Hipotesis dapat diterima apabila *P Value* bernilai di bawah 0,05 serta angka *T statistic* pada angka di atas 1,96.

Tabel 4.17
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Insentif Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak Bumi & Bangunan	0,219	0,234	0,103	2,121	0,034
Aplikasi Pakde Semar Hebat →	0,111	0,131	0,121	0,911	0,362

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi & Bangunan					
Informasi Pajak di Media Sosial → Kepatuhan Wajib Pajak Bumi & Bangunan	-0,044	-0,056	0,152	0,290	0,772

Sumber Data: Diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

Tabel di atas menjelaskan nilai koefisien jalur Insentif Pajak pada Kepatuhan Wajib PBB yakni 0,219 (bernilai positif), nilai *P Value* sebesar 0,034 ($< 0,05$), dan *T statistic* sebesar 2,121 ($> 1,96$). Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sehingga hipotesis pertama diterima.

Nilai koefisien jalur Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT pada Kepatuhan Wajib PBB yakni 0,111 (bernilai positif), nilai *P Value* sebesar 0,362 ($> 0,05$), dan *T statistic* sebesar 0,911 ($< 1,96$). Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT tidak membawa pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebabkan hipotesis kedua ditolak.

Nilai koefisien jalur Informasi Pajak di Media Sosial pada Kepatuhan Wajib PBB yakni -0,044 (bernilai negatif), nilai *P Value*

sebesar 0,772 ($> 0,05$), dan *T statistic* sebesar 0,911 ($< 1,96$). Berdasarkan data tersebut, diartikan bahwa Informasi Pajak di Media Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Tabel 4.18
Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib PBB Perkotaan	Diterima
H2	Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib PBB Perkotaan	Ditolak
H3	Informasi Pajak di Media Sosial terhadap Kepatuhan Wajib PBB Perkotaan	Ditolak

Sumber Data: Diolah dengan SmartPLS 4.0, 2025

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Hasil penelitian menyatakan hipotesis pertama atau H1 dimana Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Semarang Selatan. Hal tersebut didukung dengan analisis *bootstrapping* yang memberikan hasil *P Value* pada angka 0,034 (di bawah 0,05) serta *T statistic* pada angka 2,121 (di atas 1,96) sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Pemerintah Kota Semarang yang memberikan Insentif PBB dalam bentuk diskon atau pengurangan besaran pajak dan penghapusan denda terbukti meringankan Wajib Pajak di Kecamatan Semarang Selatan dalam pelunasan tagihan PBB.

Ketaatan Wajib PBB yang dipengaruhi Insentif Pajak mampu dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior* dimana ada suatu sikap yang terbentuk terhadap perilaku karena terdapat keyakinan bahwa perilaku tersebut membawa keuntungan jika dilakukan, dalam hal ini Wajib Pajak merasakan keuntungan ketika membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan memanfaatkan program-program Insentif Pajak sehingga hal tersebut memotivasi dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Perilaku tersebut terbentuk karena adanya penyebaran informasi secara langsung dari pemerintahan tingkat bawah (RT, RW) kepada masyarakat sehingga hal tersebut juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebelum tenggat waktu.

Keluaran dari studi ini sejalan dengan studi oleh Santoso & Djati (2022) terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bagunan di Kabupaten Tangerang serta studi dari Purwati et al. (2022) juga berpendapat bahwa Insentif Pajak memberikan dampak yang positif juga signifikan pada ketaatan Wajib Pajak karena pemerintah yang memberikan Insentif Pajak secara adil mendorong penurunan besaran PBB yang ditanggung Wajib Pajak. Temuan ini tidak sependapat dengan temuan Dewi et al. (2020) serta Siswanto & Sari (2022) yang menyatakan insentif pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara positif dan signifikan.

4.3.2 Pengaruh Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Keluaran dari studi menunjukkan penolakan pada hipotesis kedua atau H2, pada kenyataannya Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Semarang Selatan. Hal ini ditandai dengan *P Value* pada angka 0,362 berarti berada di atas 0,05 serta *T statistic* bernilai 0,911 berarti di bawah *T-table* yaitu 1,96. Semakin canggihnya sistem pembayaran pajak secara *online* melalui Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT belum tentu mendorong ketaatan pembayaran PBB oleh Wajib Pajak.

Theory of Planned Behavior yang menyatakan niat seseorang untuk membayar pajak salah satunya didorong oleh kontrol perilaku karena terdapat kemudahan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, namun ternyata statistik deskriptif variabel Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT menunjukkan 38% responden tidak mengetahui dan menggunakan aplikasi tersebut yang disediakan Pemerintah Kota Semarang untuk memudahkan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut juga didorong oleh masih kurangnya masyarakat yang mahir menggunakan teknologi informasi, termasuk *handphone* sehingga masyarakat tetap membutuhkan pendampingan dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Teori TAM (*Technology Acceptance Model*) juga mengungkapkan bahwa Wajib Pajak terdorong melakukan pembayaran pajak jika terdapat

teknologi pelunasan perpajakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam membayar pajak dengan lebih efektif dan efisien. Beberapa masyarakat di Kecamatan Semarang Selatan sebenarnya sudah mulai membayar PBB dengan aplikasi *online* karena merasa lebih fleksibel serta efektif dalam waktu dan biaya, namun penggunaan Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT masih kurang karena pengenalan akan aplikasi tersebut dirasa masih belum maksimal dilakukan oleh pemerintah, belum ada sosialisasi khusus yang rutin diadakan untuk mengenalkan Aplikasi PAKDE SEMAR HEBAT kepada masyarakat yang sebenarnya sudah didesain dengan fitur-fitur yang sangat membantu kemudahan pelayanan pajak daerah.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Semarang Selatan masih kurang merasakan keamanan dan kenyamanan ketika membayar pajak secara *online* sehingga masih memilih untuk melakukan pembayaran pajak secara langsung ke kantor kecamatan maupun kantor BAPENDA Kota Semarang yang mana akan mendapatkan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan secara fisik dibanding mendapat bukti pelunasan secara digital apabila membayar secara *online*. Berdasarkan kondisi tersebut, keluaran studi tidak serupa dengan keluaran studi Putri (2023) terkait dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan secara *online* yang berpengaruh signifikan terhadap pelunasan PBB serta penelitian Santoso & Djati (2022) yang menyatakan bahwa pembayaran pajak secara *online*

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

4.3.3 Pengaruh Informasi Pajak di Media Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa hipotesis ketiga atau H3 ditolak yang berarti Informasi Pajak di Media Sosial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Semarang Selatan. Hubungan yang tidak berpengaruh diketahui berdasarkan *P Value* pada angka 0,772 yang menunjukkan melebihi standar yang telah ditentukan ($< 0,05$) serta *T statistic* pada angka 0,290 yang berarti berada di bawah *T-table* yaitu 1,96. Interpretasi yang dapat diambil yakni semakin banyaknya informasi pajak yang dibagikan oleh pemerintah melalui media sosial belum tentu diikuti dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Theory of Planned Behavior yang menjelaskan niat berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan didorong oleh adanya norma subjektif dari persepsi orang lain melalui informasi pajak yang dibagikan di media sosial yang mengajak masyarakat untuk patuh membayar pajak dan memanfaatkan kemudahan layanan perpajakan juga insentif pajak yang pemerintah sediakan ternyata tidak berdampak pada ketaatan Wajib Pajak. Kondisi tersebut terjadi disebabkan Wajib PBB di Kecamatan Semarang Selatan belum pernah mengetahui adanya informasi pajak yang dibagikan di media sosial sehingga tidak

merasakan manfaat yang mendorong Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan sesuai informasi yang dibagikan.

Kurangnya kekonsistenan Pemerintah Kota Semarang dalam membagikan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan secara menyeluruh pada media sosial yang dimiliki BAPENDA Kota Semarang juga turut menyebabkan masyarakat tidak pernah membaca dan mengetahui adanya informasi pajak tersebut. Meskipun sebenarnya tetap ada masyarakat yang pernah membaca informasi pajak yang dibagikan Pemerintah Kota Semarang secara jelas dan sesuai dengan fakta. Kesimpulan yang diambil yakni temuan tersebut juga menyetujui Balqis & Rusdi (2020) yang menjelaskan media sosial berdampak pada ketaatan Wajib Pajak sehingga turut menolak pendapat Purwati et al. (2022) dan Putri et al. (2023) yang menyatakan Wajib Pajak melaksanakan pembayaran pajak apabila didorong oleh adanya informasi perpajakan di media sosial.